

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara, termasuk di negara Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara utama (Irianto, 2010). Pendapatan Negara terdiri dari 3 komponen utama yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan Hibah. Dimana total penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 T dari pajak kepabean & cukai Rp. 194,1 T dan penerimaan pajak Rp. 1.424,0 T dari PPh migas Rp. 38,1 T dan pajak non migas Rp. 1.385,9 T sedangkan total penerimaan Negara bukan pajak Rp. 275,4 T dari PNB lainnnya Rp. 83,8 T , pendapatan BLU Rp. 43,3 T , pendapatan SDA Rp. 103,7 T, pendapatan dari KN Rp. 44,7 T dan juga hibah 1.2 T dalam APBN 2018 (www.fiskal.kemenkeu.go.id). Di Malaysia, penerimaan pajak adalah kontributor utama pendapatan pemerintah Malaysia. Penerimaan pajak penghasilan mewakili sekitar 50 persen dari total pendapatan Pemerintah Federal Malaysia (Bank Negara Malaysia, 2003). Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik demi mensejahterakan kehidupan seluruh rakyatnya. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam suatu perusahaan yaitu dari pihak pemegang saham yang memiliki kepentingan tertinggi yang menginginkan kekayaannya meningkat pesat dan dari

pihak manajemen perusahaan yaitu manajer ingin berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi perusahaannya. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah yang ingin memungut pajak sebesar mungkin dari perusahaan tersebut hal ini membuat manajer perusahaan berfikir ulang untuk merencanakan pajaknya agar beban pajak perusahaan yang dibayarnya semakin kecil sehingga kekayaan perusahaannya tidak berkurang lebih banyak. Upaya perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya dengan cara merencanakan pajak ini diperbolehkan selama masih di dalam ruang lingkup undang – undang perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis. Pengaruh tersebut cukup berarti sehingga demikian bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sementara sebagian yang lain menilai manajemen laba sebagai aktivitas yang lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan apalagi jika upaya rekayasa manajerial ini dilakukan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi (Sulistyanto, 2014 : 48).

Laporan keuangan merupakan alat yang biasa di gunakan oleh pihak internal dan eksternal sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam ekonomi perusahaan. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya, yaitu *stakeholders* (Stice, et al., 2007). Manajer di suatu perusahaan yang bertugas mengelola perusahaan seringkali memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan investor. Manajer yang mengelola perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingannya atas biaya pemilik perusahaan.

Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (Yuliana, 2008).

Jumlah laba di suatu perusahaan merupakan informasi terpenting yang terdapat dalam laporan keuangan. Laba tersebut merupakan gambaran usaha atau kegiatan dalam memajukan perusahaan. Laba sering menjadi target rekayasa yang dilakukan pihak manajemen untuk memaksimalkan atau meminimalkan laba, dengan kata lain manajemen melakukan praktek manajemen laba (*earning management*). *Earning management* dapat terjadi karena adanya kebebasan pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang diaplikasikan dalam laporan keuangan (Bartov, 1993). Menurut Philips, et al (2003) terdapat dua motivasi utama yang membuat perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu menghindari kerugian dan menghindari penurunan laba. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari kerugian. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan yang mengalami kerugian berpotensi menurunkan harga saham, dan dampaknya akan kehilangan kepercayaan pada pihak penanam modal, serta mendorong pemerintah untuk dilakukannya pemeriksaan pajak. Motivasi kedua bertujuan untuk menghindari penurunan laba. Hal tersebut bertujuan agar laba yang tersaji dalam laporan keuangan tidak berfluktuasi karena akan memberikan dampak yang kurang baik terutama bagi pihak investor.

Laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental di suatu perusahaan terdapat faktor utama yaitu upaya perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak - pihak yang berkepentingan hal ini

sebabnya informasi yang di dapat tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) yakni kondisi dimana tidak adanya keseimbangan informasi yang di dapat antara pihak manajer sebagai yang mempublikasikan informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Hairu, 2009:1).

Manajemen laba merupakan upaya untuk menyembunyikan, mengubah, mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan, merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan (Sulityanto, 2008). Sedangkan menurut (*National Association of Certified Fraud Examiners*, 1993 dalam Hairu, 2009) mengartikan manajemen laba hal yang disengaja dengan kesalahan atau kelalaian dalam membuat laporan keuangan mengenai data akuntansi dan fakta material, sehingga informasi tersebut menyesatkan ketika dipakai untuk membuat pertimbangan yang menyebabkan orang membacanya akan putar arah atau mengubah keputusannya.

Manajemen laba yaitu pihak manajer berupaya melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori ini mengungkapkan bahwa praktik manajemen laba dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajer sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik tersebut muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkannya.

Pada suatu sisi manajer perusahaan ingin mempublikasikan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para penggunanya. Namun di lain sisi manajer perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah dengan meminimalkan laba kena pajak yang di laporkan untuk keperluan pajak (*Ettredge et al., 2008*).

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam tulisannya mengatakan dari pihak yang berkepentian antara pihak eksternal dan internal, di dalam suatu perusahaan yang menggunakan laporan keuangan terkadang terdapat kepentingan yang mengakibatkan pertentangan yang dapat merugikan pihak – pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan tersebut dikarenakan dari pihak manajer yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan pemegang saham yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, pihak manajer berkeinginan mendapatkan kredit yang besar dengan bunga yang rendah, sedangkan dari pihak kreditor dapat memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajer berupaya membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan dari pihak pemerintah ingin memungut pajak sebesar – besarnya dari perusahaan.

Menurut Supramono (2010 : 2) pajak dapat diartikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Perusahaan yang berskala lebih besar memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai pihak dan dari berbagai sumber, dari hal ini perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur, dikarenakan kreditur memandang perusahaan perusahaan yang berskala besar memiliki probabilitas yang tinggi akan tetap bertahan, bersaing dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan

dengan ukuran yang kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian persaingan industri, karena perusahaan kecil lebih cepat merespon terhadap perubahan mendadak kondisi fakta di lapangan.

Dengan adanya keinginan dari pihak manajer agar membuat dan menekan beban pajaknya sekecil mungkin, maka pihak manajer lebih cenderung meminimalkan tanggungan pajaknya. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini bisa disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses pengelompokan usaha wajib pajak yang pada akhirnya proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena hal tersebut diperbolehkan oleh pemerintah selama masih berada di batas naungan undang-undang perpajakan yang berlaku di setiap negara.

Menurut Santana (2016) perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba, dengan demikian saham yang dimiliki oleh pihak manajer tidak sebanding dengan saham yang dimiliki perusahaan ataupun pihak luar. Penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) yang berpendapat bahwasanya upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya. Sumomba et al. (2012) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, dengan demikian hasilnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan di antara

perencanaan pajak dengan manajemen laba. Marliana, (2017) meneliti tentang “*Manajemen laba di Indonesia dan Malaysia dalam masyarakat ekonomi Asean*” menemukan bahwasanya, terdapat praktik manajemen laba di Indonesia dan Malaysia dalam era masyarakat ekonomi asean atas data pengamatan sampai dengan tahun 2015.

Hubungan antara perencanaan pajak & manajemen laba yang memiliki kesamaan terkait adanya potensi guna mempengaruhi laba akuntansi & laba fiskal. Perencanaan pajak disini yaitu suatu tindakan melakukan kenaikan pendapatan dan penurunan biaya, maka demikian akan berdampak kepada arus kas operasi, sehingga kondisi tersebut terkait dengan laba perusahaan, laba yang meningkat akan berdampak terhadap pembayaran pajak perusahaan juga meningkat. Oleh karenanya, manajer perusahaan akan mencari cara dengan memilih teknik manajemen laba guna mencapai target laba dengan adanya indikasi perekayasa laporan keuangan, yang dilakukan dengan penggunaan metode standart akuntansi.

Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan hingga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap penyerapan tenaga kerja, ekspor hingga peningkatan produktivitas, investasi. “Potensi industri makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi *champion*, karena supply dan *user*-nya banyak. Untuk itu, salah satu kunci daya saingnya di sektor ini adalah *food innovation and security*,” Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pelepasan Kontainer Ekspor ke-250.000 Mayora Group di Tangerang, Banten, Senin (18/2). Kementerian Perindustrian

mencatat, sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen. Justru, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar beserta sedang di triwulan IV-2018 naik sebesar 3,90 persen (*y-on-y*) atas triwulan IV-2017, salah satunya dikarenakan meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44 persen. Selanjutnya, industri makanan menjadi salah satu sektor yang membantu peningkatan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 menyumbang sampai dengan Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur selama tahun lalu mencapai Rp222,3 triliun. “Di tahun 2018, tenaga kerja di sektor industri manufaktur mencapai 18,25 juta orang atau naik 17,4 persen dibandingkan tahun 2015. Industri makanan menjadi kontributor terbesar hingga 26,67 persen,” tuturnya. Menperin mengungkapkan, produk makanan dan minuman Indonesia sudah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Hal ini ditandai dengan adanya capaian nilai ekspor sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018. “Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional,” tuturnya. Pada 2017, tercatat ekspor produk manufaktur nasional di angka USD125,1 miliar, meningkat hingga USD130 miliar di tahun 2018 atau naik sebesar 3,98 persen. “Jadi, tahun lalu kontribusinya tertinggi mencapai 72,25 persen,” tuturnya. Menperin yakin bahwa industri makanan dan minuman nasional mampu melakukan pintasan inovasi produk. Upaya ini guna memenuhi selera konsumen dalam dan juga konsumen luar negeri. Terlebih lagi adanya pelaksanaan industri 4.0, dengan pemanfaatan teknologi terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan juga kompetitif (kemenperin.go.id).

Tabel 1.1

Daftar negara asean, *coporate tax*, GDP, GDP from manufacturing

No	Negara Asean	Corporate Tax	GDP (USD Billion) dec/18	GDP From Manufacturing
1	Singapura	17%	364	22870 (SGD Million)
2	Brunei Darussalam	18,50%	13.57	764 (BND Million)
3	Thailand	20%	505	718654 (THB Million)
4	Vietnam	20%	245	495670 (VND Billion)
5	Kamboja	20%	24.57	11253 (KHR Billion)
6	Malaysia	24%	354	79011 (MYR Million)
7	Laos	24%	18.13	9817 (LAK Billion)
8	Indonesia	25%	1042	564982 (IDR Billion)
9	Myanmar	25%	71.21	-
10	Filipina	30%	331	547022 (PHP Million)

(www.tradingeconomics.com)

Negara asean yang meliputi sepuluh Negara terdapat perbedaan dari segi *corporate tax*, GDP dan juga GDP from manufacturing. Dari segi *corporate tax* tertinggi 30% dari Filipina, 25% dari Indonesia dan Myanmar dan juga 24% dari Malaysia dan Laos. Dari segi GDP tertinggi Indonesia 1042 kedua Thailand dan ketiga Singapura dan Malaysia. Dari segi GDP from manufacturing tertinggi Malaysia kedua Singapura dan ketiga Indonesia. Mustika, (2011) menyatakan bahwa variabel PDB dengan Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan alfa masing – masing 0,05 & 0,01.

Untuk uji F terlihat kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan) pada alfa 0,01. Sedangkan nilai R² sebesar 59,75 persen. artinya kemampuan model menjelaskan variabel dependen sebesar angka tersebut, sisanya sebesar 40,25 persen di jelaskan oleh variabel lain. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya PDB membuka peluang lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.2

Makanan, minuman, & tembakau: pertumbuhan permintaan pasar (dalam%)

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	3.5	4.3	4.3	4.3	4.8	4.7	4.8	5.0
Malaysia	4.5	5.7	6.4	4.9	4.2	4.3	4.7	5.1
Philippines	3.3	4.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.4	3.3
Singapore	4.5	2.2	2.9	3.4	4.7	4.8	4.8	4.9
Thailand	-0.3	4.9	-1.3	-1.3	1.9	2.9	2.9	2.8
Vietnam	-0.4	0.2	0.9	1.9	2.8	3.0	3.0	3.4

Sumber: *Economist intelligence unit*, 2014 (data untuk tahun 2014 dan seterusnya merupakan ramalan. Sedangkan untuk tahun sebelumnya merupakan data actual atau perkiraan).

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kedua Negara Indonesia dan Malaysia mendominasi persentase pertumbuhan permintaan pasar makanan minuman, dan tembakau meliputi wilayah asia tenggara dari tahun 2011–2018. Industri makanan & minuman merupakan salah satu sektor industri strategis dan memiliki banyak sekali cakupan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) cakupan dan klasifikasi industri makanan & minuman di Indonesia sangat banyak, mulai dari produk ikan, hewan, dan produk-produk nabati yang lain. Pada intinya produk makanana & minuman ini berfokus pada satu hal yakni kebutuhan primer sehari-hari. Sehingga pergerakan / pertumbuhannya sangat

cepat. Berbeda dengan pergerakan industri yang lainnya seperti elektronik, furnitur, dan lain-lain yang relatif lama Amelia dkk, (2017).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu letak perbedaan dari objek dan tahun penelitian. Peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Objek yang digunakan peneliti yaitu perusahaan *food & bevearage*. Peneliti memfokuskan perusahaan tersebut karena terdapat persaingan yang ketat di dalamnya sehingga berdampak kepada tingkat produksi yang terus meningkat, lapangan pekerjaan meningkat otomatis penyerapan ketenagakerjaan meningkat sehingga angka kemiskinan menurun dan juga melekat erat kepada aktivitas konsumsi masyarakat. Peneliti juga menggunakan studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang sebanding untuk di teliti dari segi *GDP* dan juga *GDP from manufacturing* di wilayah se asia tenggara, besarnya *GDP* membuka peluang lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dan juga bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Tahun penelitian yang di gunakan peneliti dari tahun 2014 - 2018.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya peneliti akan meneneliti dengan judul :

“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan *Food & Beverage* (Studi Perbandingan Indonesia – Malaysia)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di uraikan dan di jelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa tujuannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti – bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba di perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti – bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba di perusahaan *food and beverage* yang terdaftar Di Bursa Malaysia.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini ingin memberikan manfaat yang berdampak positif yang di uraikan di bawah ini :

- a. Manfaat praktis :
 - 1. Harapan Peneliti terhadap hasil dari penelitian ini memberikan pandangan dan tambahan informasi bagi pengembang praktik agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui seberapa besar dampak dan efek dari praktik manajemen laba.
 - 2. Bagi pemerintah hasil dari penelitian ini sebagai tambahan informasi, referensi, dan antisipasi regulasi mengenai manajemen laba.
- b. Manfaat teoritis : penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi untuk peneliti selanjutnya baik pihak akademisi yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.